

SKRIPSI

pk
AN 08/02
Pra
b

DJOKO PRASETYO

**BANTUAN HUKUM SERIKAT PEKERJA DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN**

(Studi Kasus Di Radisson Bali Hotel & Suites)

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**



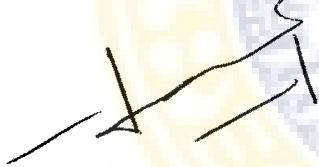
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2002**

**BANTUAN HUKUM SERIKAT PEKERJA DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
(Studi Kasus di Radisson Bali Hotel & Suites)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131878388

Penyusun,



Djoko Prasetyo
NIM. 039814639

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2002

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian tersebut dalam bab-bab sebelumnya, maka diakhir penulisan skripsi ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bantuan hukum dalam konsep hubungan perburuhan lebih ditujukan sebagai upaya untuk menegakkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja. Pemberian bantuan hukum oleh Serikat Pekerja ini tidak terlepas dari tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang no. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Keberadaan Serikat Pekerja dalam memberikan bantuan hukum bagi pekerja dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan adalah sangat vital, mengingat Undang-undang no. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan hanya mengatur perselisihan dari pekerja yang menjadi anggota dari Serikat Pekerja dimana ia bekerja.
2. Dalam contoh kasus PHK yang terjadi di *Radisson Bali Hotel & Suites* tersebut memperlihatkan peranan Serikat Pekerja begitu besar dalam menyelesaikan masalah PHK yang dihadapi oleh pekerja. Serikat Pekerja Radisson akan memberikan bantuan hukum bagi pekerja yang menghadapi PHK dari tahap berunding dengan manajemen perusahaan sampai ke tingkat lembaga Tripartit. Namun demikian dalam memberikan bantuan hukum tersebut, Serikat Pekerja tidak memaksa dan menghormati hak pekerja apabila ia tidak lagi menghendaki bantuan dari Serikat Pekerja.

2. Saran

- 1) Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dibutuhkan kesadaran dari seluruh pihak yang terkait, baik pihak pemerintah, pengusaha dan pekerja.
- 2) Untuk lebih meningkatkan peranan Serikat Pekerja dalam memberikan bantuan hukum bagi pekerja dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, maka kewenangan Serikat Pekerja dalam memberikan bantuan hukum tersebut harus lebih dipertegas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat hanya Serikat Pekerja yang mempunyai daya tawar terhadap pengusaha bila terjadi perselisihan perburuhan.